

ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus*) DI PERAIRAN KABUPATEN PANGKEP SULAWESI SELATAN

ALTERNATIVE MANAGEMENT OF SWIMMING CRABS FISHING (*Portunus pelagicus*) IN THE WATERS OF PANGKEP DISTRICT WATERS SOUTH SULAWESI

Ihsan¹, Eko Sri Wiyono², Sugeng Hari Wisudo² dan John Haluan²

¹ Mahasiswa Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap-Institut Pertanian Bogor

² Dosen Program Studi Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap-Institut Pertanian Bogor

Teregistrasi I tanggal: 08 April 2014; Diterima setelah perbaikan tanggal: 20 April 2015;

Disetujui terbit tanggal: 24 April 2015

E-mail: ihsanpsp@yahoo.co.id

ABSTRAK

Upaya melakukan perbaikan pengelolaan perikanan rajungan merupakan solusi untuk mencapai sistem pengelolaan rajungan yang berkelanjutan. Kajian tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di kecamatan pesisir dan dua kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep, pada bulan Desember 2012- April 2013. Data primer diperoleh dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan *responden* melalui *Focus Group Discussion*. Pengambilan data sekunder dari instansi terkait. Analisis digunakan dengan A'WOT mengaplikasikan *Program Expert Choice 2000*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Kriteria komponen kekuatan menempatkan prioritas relatif pertama minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi, peluang menetapkan target PEMDA dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi, kelemahan ditetapkan kordinasi dan implementasi kelembagaan masih rendah, ancaman ditetapkan jumlah alat tangkap rajungan semakin meningkat. Urutan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan adalah: a) Penciptaan mata pencaharian alternatif; b) Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; c) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; d) *Restocking* rajungan; e) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan f) Pengembangan budidaya rajungan.

KATA KUNCI: Pengelolaan, perikanan, rajungan, Kabupaten Pangkep

ABSTRACT

The effort to make improvement in a management policy of crab fishing is a solution to achieve sustainable resource management system. The purpose of this study is to examine an alternative management policy in crab fishing. This research gives an input for the government to regulate the crab fishing management. Research conducted in sub districts of all coastal and two islands in Pangkep districts in December 2012-April 2013. The primary data obtained from the field observations and interviews with respondents through Focus Group Discussion. Collection of secondary data was done by collecting data from the relevant agencies and recording data from collector. Data were analyzed using A'WOT analysis and Program Expert Choice 2000. The results of the analysis showed that the crab fishing management, relying on the strengths and opportunity to address the weaknesses and threats. The first priority of the strength component criteria were relative interest crab fishermen and management of high society, high target of local government in the management of crab fishing was opportunity component, coordination and implementation of institutional became a weakness component, and increasing number of crab fishing gear was became Threats. Recommendation of alternatives management for swimming crab include: a) Development of alternative livelihoods, b) Law enforcement and institutional capacity building; c) Use of environmentally friendly fishing gear ; d) Restocking of crab; e) Crab fisheries management based on zonation and f) crab aquaculture development

KEYWORDS: Management, blue swimming crabs, Pangkep District

PENDAHULUAN

Potensi sumberdaya alam hayati pesisir dan laut termasuk rajungan belum banyak dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Wilayah perairan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk rajungan. Kekayaan yang besar tersebut merupakan modal utama untuk membangun daerah serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya rajungan (*Portunus pelagicus*) selama ini belum mengikuti kaedah pemanfaatan yang bertanggung jawab dimana masih dilakukan dengan cara merusak lingkungan seperti penggunaan alat tangkap *trawl*. Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Berbagai gejala yang muncul seperti penurunan jumlah hasil tangkapan setiap tahunnya walaupun ada penambahan upaya penangkapan (*effort*) dan ukuran rajungan yang tertangkap semakin kecil tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang penangkapan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) >10 cm (diatas sepuluh centimeter). Dengan pengelolaan sumberdaya rajungan yang benar diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sumberdaya rajungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh karena itu masyarakat nelayan hendaknya memanfaatkan sumberdaya secara bijaksana dan berkeadilan.

Pengelolaan rajungan secara bijaksana dan mengurangi penangkapan secara *destruktif* dapat memberikan kepastian usaha penangkapan secara berkelanjutan (Firman, 2008). Semua itu dapat dicapai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan pengelolaan yang tepat dengan seluruh *stakeholder* dapat mematuhi kebijakan tersebut.

Kaleka (2006) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dibedakan atas tiga tingkatan yakni kebijakan umum diantaranya adalah mengacu pada bentuk Undang-Undang dan Keputusan Presiden, kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang dibentuk berupa peraturan-peraturan pemerintah

maupun daerah dan kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang dibawah oleh kebijakan pelaksanaan. Setiap kebijakan akan memiliki muatan dan tekanan yang berbeda. Kebijakan umum misalnya lebih menekankan pada isu strategi dan sedikit unsur teknis. Kebijakan teknis lebih menekankan pada unsur teknis dan isu strategisnya sedikit. Berbeda dengan kebijakan pelaksanaan yang lebih melihat pada perimbangan antara teknis dan isu strategis. Selanjutnya Weimer & Vining (1998) dalam Kaleka, (2006) mengatakan produk dari analisis kebijakan adalah saran (*advice*) yang berorientasi pada pengguna yang berkaitan dengan keputusan keputusan publik berdasarkan nilai-nilai sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan sebagai proses sintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan suatu rekomendasi opsi disain kebijakan publik. Agar sumberdaya perikanan dapat dikelola dengan dengan baik dan pemanfaatannya pun optimal maka perlu dilakukan dengan membentuk suatu kebijakan yang rasional, dengan instrumen-instrumen konvensional yang sering digunakan diantaranya adalah pajak baik pajak terhadap input maupun output perikanan, pembatasan entri (*limited entry*) maupun kuota.

Pemanfaatan sumberdaya rajungan di Kabupaten Pangkep telah berlangsung cukup lama dan telah menunjukkan adanya gejala gangguan terhadap potensi sumberdaya rajungan. (Baskoro, 2011) menjelaskan masalah perikanan tangkap adalah turunnya hasil tangkapan karena eksploitasi berlebihan. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah alternatif kebijakan pengelolaan yang tepat dalam bentuk kebijakan pengelolaan sumberdaya rajungan di perairan Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perubahan kebijakan pengelolaan perikanan rajungan adalah merupakan suatu solusi untuk mencapai sistem pengelolaan sumberdaya rajungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya rajungan secara optimal dan berkelanjutan.

BAGAIMANA PENELITIAN DILAKUKAN?

Penelitian ini dilaksanakan di satu wilayah kecamatan pesisir dan dua kecamatan pulau-pulau kecil wilayah Kabupaten Pangkep, meliputi Kecamatan Mandale, Sigeri, Ma'rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara pada Desember 2012 - Juni

2013. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: daftar kuisioner, peta lokasi, alat tulis menulis, kamera *digital* dan perekam suara serta form isian pengamatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei lapang terkait keragaan lokasi dan melakukan wawancara kepada dua kategori responden yakni *facilitator* dan *participating* dan pengambilan data-data lainnya dari instansi terkait. Pengertian *facilitator* adalah peneliti dan akademisi yang memiliki latar belakang ilmiah, yang bertindak sebagai responden dengan berlandaskan pada pengamatan yang terjadi di lapangan. *Participating* adalah responden yang terpilih dari berbagai unsur yang memahami dengan baik permasalahan yang dibahas serta mewakili seluruh komponen yang diteliti. Disamping itu dilakukan *combined* data dari kategori responden *facilitator* dan *participating*. Pengertian *combined* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kombinasi antara hasil data responden *facilitator* dengan *participating* untuk mendapatkan nilai rata-rata sebagai salah satu responden. Kriteria kategori responden *participating* adalah memahami permasalahan yang diteliti; pelaku perikanan rajungan (nelayan penangkap, pengumpul dan pengolah daging); unsur pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan unsur lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pemberdayaan nelayan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pemilihan responden dilakukan dengan cara **Purposive sampling** adalah teknik pengambilan sampel yang diambil secara sengaja, dengan pertimbangan tertentu bahwa responden adalah pelaku memahami dengan baik terkait dengan persoalan yang diteliti antara lain: pemerintah, swasta, masyarakat dan nelayan yang dapat memberikan informasi secara akurat, pengambil kebijakan dan sebagai pelaku.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi prioritas pilihan kebijakan pengelolaan perikanan rajungan adalah A'WOT yaitu gabungan antara metode SWOT dengan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Analisis kebijakan pengelolaan perikanan rajungan dilakukan dengan pendekatan analisis A'WOT, yaitu analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) yang diintegrasikan kedalam *Analisis Hierarchy Proses* (AHP) (Budiharsono, 2001; (Soeselisa, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan dari pada integrasi ini adalah untuk meningkatkan basis informasi kuantitatif dari proses-proses perencanaan strategis. SWOT memberikan kerangka dasar untuk pembentukan suatu analisis keputusan sementara

AHP membantu dalam membuat SWOT lebih analitik dan melakukan analisis sehingga strategi-strategi alternatif keputusan dapat diprioritaskan.

Tahapan metode A'WOT adalah: (1) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan perikanan rajungan secara berkelanjutan di Kabupaten Pangkep dengan metode SWOT; dan (2) Melakukan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Dalam analisis A'WOT ini, dilakukan dengan menggunakan *Program Expert Choice 2000*. Selanjutnya nilai-nilai yang digunakan dalam analisis program mengacu kriteria skala kepentingan, berdasarkan (Saaty, 1993); (Soeselisa, 2006).

KOMPONEN DAN FAKTOR-FAKTOR ANALISIS SWOT

Untuk melakukan identifikasi faktor-faktor SWOT dalam pengelolaan perikanan rajungan mengacu pada hasil *verifikasi* data di lapangan, dengan melakukan survey dan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan pengelolaan perikanan rajungan, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA, tokoh masyarakat, nelayan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para peneliti dari perguruan tinggi setempat. Hasil identifikasi dari faktor-faktor komponen SWOT disajikan pada Tabel 1.

PRIORITAS KOMPONEN DAN FAKTOR-FAKTOR SWOT

Hasil analisis A'WOT, dengan kategori responden *facilitator*, *participating* dan *combined* maka yang menjadi prioritas komponen SWOT dalam hubungannya dengan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, sebagai prioritas relatif secara berturut-turut adalah (1) kekuatan (S); (2) peluang (O); (3) kelemahan (W) dan (4) ancaman (T).

Metode SWOT adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan perikanan rajungan secara berkelanjutan di Kabupaten Pangkep dengan metode SWOT; dan melakukan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Dalam analisis A'WOT ini, nilai-nilai bobot diperoleh dengan menggunakan *Program Expert Choice 2000*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan rajungan, mengandalkan pada kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang akan terjadi. Secara rinci hasil analisis A'WOT untuk komponen-komponen SWOT dalam pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, kedua kategori responden tersebut masing-masing disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Komponen dan faktor SWOT pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep

Table 1. Component and factor of SWOT for swimming crab fishery management in Pangkep waters

Kekuatan atau <i>Strength</i> (S)		Kelemahan atau <i>Weaknesses</i> (W)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan rajungan ▪ Minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi ▪ Masih tersedia potensi rajungan ▪ Dukungan Pemda pengelolaan rajungan tinggi ▪ Ada kesepakatan pengelolaan daerah penangkapan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kordinasi dan implementasi masih rendah ▪ Pengawasan belum efektif dan efisien ▪ Dukungan modal usaha rendah ▪ Belum ada aturan secara formal ▪ Kualitas SDM masih rendah ▪ Ketergantungan pada rajungan tinggi ▪ Pemahaman nelayan kelestarian rendah 		
Peluang atau <i>Opportunities</i> (O)		Ancaman atau <i>Threats</i> (T)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target pengelolaan rajungan tinggi ▪ Dukungan stakeholder besar ▪ Perbaikan lingkungan perairan ▪ Industri rumah tangga semakin banyak ▪ Rajungan bernilai ekonomis penting ▪ Pemasaran baik dan lancar ▪ Permintaan daging rajungan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah alat tangkap semakin meningkat ▪ Tertangkap fase zoea-rajungan muda ▪ Sebagian rajungan tertangkap bertelur ▪ Intensitas penangkapan tinggi ▪ Mengabaikan daya dukung lingkungan ▪ Alat tangkap tidak selektif ▪ Tertangkap rajungan muda 		

Sumber: diolah berdasarkan data hasil pengamatan dan wawancara di Kab. Pangkep, tahun 2013

Tabel 2. Prioritas komponen SWOT berdasarkan analisis A'WOT dalam pengelolaan perikanan tangkap rajungan

Table 2. Component priority of SWOT based on A'WOT analysis in crab fishery management

Komponen/ <i>Component SWOT</i>	Responden					
	<i>Facilitator</i>		<i>Combined</i>		<i>Participating</i>	
	Bobot	Prioritas Relatif	Bobot	Prioritas Relatif	Bobot	Prioritas Relatif
Kekuatan (S)	0,447	P1	0,481	P1	0,407	P1
Kelemahan (W)	0,203	P3	0,182	P3	0,173	P3
Peluang (O)	0,251	P2	0,259	P2	0,285	P2
Ancaman (T)	0,099	P4	0,079	P4	0,135	P4

Sumber: Hasil analisis SWOT, tahun 2013

Hasil analisis pada kriteria komponen **kekuatan/strength (S)** menunjukkan bahwa untuk kategori responden *facilitator* menempatkan prioritas relatif pertama adalah keinginan nelayan dan masyarakat dalam pemanfaatan rajungan cukup tinggi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah nelayan penangkap dan pengolah daging rajungan (industri pengolah rajungan) setiap tahunnya. Untuk kategori responden *combined* dan *participating* menempatkan

prioritas relatif pertama adalah adanya pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan rajungan. Pada umumnya program *Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP)* I dan II beberapa tahun lalu di Kabupaten Pangkep meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan. Kekuatan lainnya tersedia potensi lestari sebesar 1.084,066 ton/tahun (Ihsan *et al.*, 2014). Indeks musim penangkapan rajungan, dengan puncak musim pada

bulan juni dan september setiap tahun (Ihsan, et al., 2014).

Kriteria komponen **peluang/opportunities (O)** ditetapkan prioritas relatif untuk kategori responden *facilitator*, *participating* dan *combined* dengan menetapkan target Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam pengelolaan perikanan rajungan tinggi sebagai peluang. Rajungan merupakan salah satu komoditi andalan di Kabupaten Pangkep, oleh karena itu PEMDA mengharapkan peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan perikanan rajungan.

Faktor-faktor komponen **kelemahan/weaknesses(W)** ditetapkan prioritas relatif untuk kategori responden *facilitator*, *participating* dan *combined* berdasarkan prioritas relatif tersebut responden berpandangan bahwa kelemahan yang terjadi adalah koordinasi dan implementasi

kelembagaan masih rendah. Kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan telah terbentuk sesuai kebutuhan demikian juga peraturan-peraturan daerah (PERDA) telah banyak ditetapkan, tetapi masih ditemukan banyak permasalahan-permasalahan di lapangan seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. (Adam et al., 2006) mengatakan alat tangkap *mini trawl* merupakan salah satu alat tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep. Hal ini terjadi karena hukum belum ditegakkan dengan baik. Faktor-faktor komponen **ancaman/threats (T)** ditetapkan prioritas relatif untuk kategori responden *facilitator*, *participating* dan *combined* yakni jumlah alat tangkap rajungan yang beroperasi semakin meningkat, menjadi suatu ancaman. Secara keseluruhan komponen ancaman tersebut, akan memberikan dampak negatif dalam pengelolaan perikanan rajungan di Kabupaten Pangkep. Selengkapnya nilai-nilai bobot dan prioritas relatif berdasarkan analisis A'WOT disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil analisis A'WOT terhadap nilai bobot prioritas dari faktor-faktor komponen SWOT
Table 3. Result analysis of A'WOT base on weighted priority of SWOT factor component

Komponen/ Component SWOT	Responden					
	Facilitator		Combined		Participating	
	Bobot	Prioritas Relatif	Bobot	Prioritas Relatif	Bobot	Prioritas Relatif
▪ Kekuatan	(L: 0,376)		(L:0,481)		(L: 0,488)	
Adanya pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan rajungan	0,226	P3	0,345	P1	0,355	P1
Minat nelayan dan masyarakat pengelolaan rajungan tinggi	0,267	P1	0,251	P2	0,249	P2
Masih tersedia potensi rajungan	0,233	P2	0,178	P3	0,174	P3
Dukungan PEMDA pengelolaan rajungan tinggi	0,123	P4	0,108	P4	0,107	P4
Ada kesepakatan pengelolaan daerah penangkapan	0,095	P5	0,072	P5	0,070	P5
▪ Kelemahan	(L:0,438)		(L:0,182)		(L: 0,179)	
Kordinasi dan implementasi masih rendah	0,268	P1	0,315	P1	0,316	P1
Pengawasan belum efektif dan efisien	0,235	P2	0,237	P2	0,237	P2
Dukungan modal usaha rendah	0,201	P3	0,167	P3	0,166	P3
Belum ada aturan secara formal	0,082	P5	0,118	P4	0,121	P4
Kualitas SDM masih rendah	0,101	P4	0,075	P5	0,074	P5
Ketergantungan pada rajungan tinggi	0,046	P7	0,051	P6	0,051	P6
Pemahaman nelayan kelestarian rendah	0,067	P6	0,036	P7	0,034	P7

Tabel 3. Lanjutan
Table 3. Continuation

Komponen/ Component SWOT	Responden					
	Facilitator		Combined		Participating	
	Bobot	Prioritas Relatif	Bobot	Prioritas Relatif	Bobot	Prioritas Relatif
▪ Peluang	(L:0,128)		(L:0,259)		(L:0,257)	
Target pengelolaan rajungan tinggi	0,279	P1	0,288	P1	0,287	P1
Dukungan stakeholder besar	0,238	P2	0,220	P2	0,218	P2
Permintaan daging rajungan tinggi	0,144	P3	0,165	P3	0,167	P3
Perbaikan lingkungan perairan	0,086	P5	0,118	P4	0,121	P4
Industri rumah tangga semakin banyak	0,099	P4	0,076	P5	0,075	P5
Rajungan bernilai ekonomis penting	0,081	P6	0,057	P6	0,056	P6
Pemasaran baik dan lancar	0,040	P7	0,044	P7	0,045	P7
▪ Ancaman	(L: 0,058)		(L:0,079)		(L:0,077)	
Jumlah alat tangkap semakin meningkat	0,303	P1	0,328	P1	0,331	P1
Tertangkap fase zoea-rajungan muda	0,265	P2	0,251	P2	0,254	P2
Sebagian rajungan tertangkap bertelur	0,154	P3	0,160	P3	0,159	P3
Intensitas penangkapan tinggi	0,138	P4	0,107	P4	0,104	P4
Mengabaikan daya dukung lingkungan	0,063	P5	0,072	P5	0,072	P5
Alat tangkap tidak selektif	0,046	P6	0,046	P6	0,045	P6
Tertangkap rajungan muda	0,031	P7	0,035	P7	0,035	P7

Sumber: Hasil analisis A'WOT, Tahun 2013

RUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

Dari hasil analisis dan indentifikasi faktor-faktor komponen SWOT maka disusun suatu rumusan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep. (Rangkuti, 2002) mengatakan bahwa penyusunan rumusan alternatif kebijakan pengelolaan sumberdaya hayati menggunakan pendekatan strategi *strength-opportunities (SO)*, *strength-threats (ST)*, *weaknesses-opportunities (WO)* dan *weaknesses-threats (WT)*. Pendekatan didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Hasil analisis dari rumusan tersebut terpilih alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep sebagai berikut: a) Penegakan hukum; b) *Restocking* sumberdaya rajungan; c) Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi; d) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; e) Pengembangan budidaya rajungan; dan f) Penciptaan mata pencaharian alternatif.

PRIORITAS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

Hasil analisis A'WOT untuk kategori responden (*facilitator; combined dan participating*) dari rumusan alternatif kebijakan yang terpilih menempatkan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan yang paling utama adalah:1)

Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan; 2) Penegakan hukum; 3) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; 4) Melakukan *restocking* sumberdaya rajungan; 5) Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi; 6)

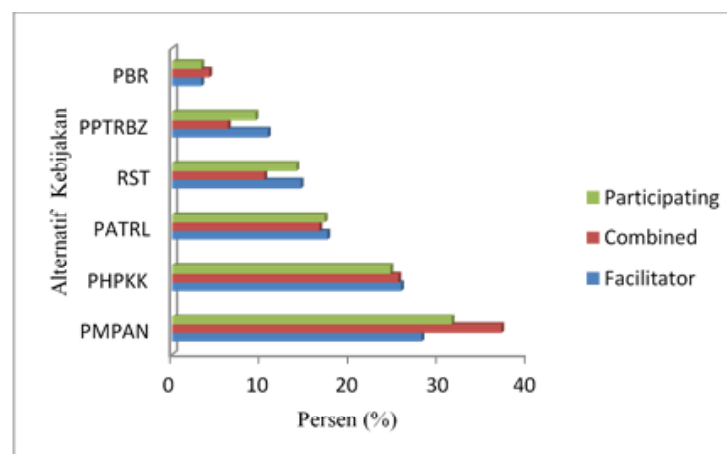
Pengembangan budidaya rajungan. Keenam alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep

Table 4. Alternative priority swimming crab fishery management in Pangkep District waters

Alternatif kebijakan/Policy alternative	Responden								
	Facilitator			Combined			Participating		
	Bobot	%	PR	Bobot	%	PR	Bobot	%	PR
Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan	0,281	28,1	P1	0,371	37,1	P1	0,315	31,5	P1
Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan	0,258	25,8	P2	0,255	25,5	P2	0,246	24,6	P2
Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan	0,175	17,5	P3	0,166	16,6	P3	0,172	17,2	P3
<i>Restocking</i> sumberdaya rajungan	0,145	14,5	P4	0,104	10,4	P4	0,140	14,0	P4
Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi	0,108	10,8	P5	0,063	6,3	P5	0,094	9,4	P5
Pengembangan budidaya rajungan	0,033	3,3	P8	0,028	4,2	P8	0,033	3,3	P8

Sumber: Hasil analisis SWOT, 2013 PR: Prioritas relatif



Gambar 1. Prioritas alternatif kebijakan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep.

Figure 1. Alternative priority swimming crab fishery management in Pangkep District waters.

Keterangan:

Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan (PMPAN); Penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan (PHPKK); Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (PATRL); *Restocking* (RST) sumberdaya rajungan; Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi (PPTRBZ) dan Pengembangan budidaya rajungan (PBR).

Uraian alternatif kebijakan pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep adalah: **1) Penciptaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan.** Mata pencaharian *alternative* (MPA) merupakan suatu usaha baru yang dikembangkan dalam rangka mengurangi tekanan terhadap sumberdaya sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (KP3K-DKP-RI, 2007). Usaha alternatif tersebut memanfaatkan waktu luang nelayan dan keluarganya, menjadikan usaha alternatif sebagai mata pencaharian pokok; **2) Penegakan hukum.** Alasan klasik yang disampaikan oleh nelayan, jika tertangkap saat melakukan pelanggaran di laut adalah “tidak tahu” bahwa yang dilakukan adalah dilarang. Pelanggaran hukum yang terkait pemanfaatan secara *destruktive* dilakukan oleh nelayan tidak tersentuh dengan baik oleh hukum, akibatnya terjadi kerusakan sumberdaya perairan. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, yaitu sulitnya menjangkau tempat kejadian perkara (TKP) karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegakan hukum dan laporan dari masyarakat masih sulit dibuktikan. Untuk mengurangi hambatan tersebut maka hal yang paling utama dilakukan adalah penyediaan kapal dan biaya operasionalnya; **3) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.** Hasil inventarisasi terhadap alat tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep ditemukan beberapa alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. (Purbayanto *et al.*, 2010) mengatakan bahwa penggunaan setiap jenis teknologi penangkapan ikan mulai dari yang sederhana hingga modern sedikit atau banyak memberikan dampak negatif terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan perairan. (Ihsan *et al.*, 2012) mengatakan bahwa alat tangkap rajungan ramah lingkungan yang dapat dioperasikan di perairan Kabupaten Pangkep adalah gillnet dan bubu; **4) Melakukan *restocking* sumberdaya rajungan.** *Restocking* adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung laju *rekrutmen* suatu spesies di perairan. Intervensi ini dimaksudkan untuk mempertahankan stabilitas rajungan, agar supaya ketersediaan potensi rajungan di perairan tetap stabil. Kebijakan *restocking* dapat dilakukan pada bulan Desember-Maret setiap tahun dimana pada saat itu intensitas penangkapan nelayan rendah, menyebabkan bibit rajungan hasil *restocking* tidak terganggu, karena kondisi cuaca tidak memungkinkan nelayan untuk melakukan penangkapan; **5) Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi.** Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-

proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (KKP-KP3K-RI, 2010). Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi, didalamnya terbentuk zona penangkapan dan zona konservasi. Zona konservasi adalah zona *zoea*, *megalopa* dan rajungan muda, agar terhindar dari kegiatan penangkapan dan zona penangkapan adalah zona rajungan dewasa yang merupakan zona daerah penangkapan rajungan, yang disesuaikan dengan jumlah alat tangkap rajungan yang beroperasi di Kabupaten Pangkep; **6) Pengembangan budidaya rajungan.** Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan pasar adalah budidaya rajungan. Pengembangan budidaya rajungan mampu membuka kembali rantai ekonomi di masyarakat, sekaligus alternatif komoditi yang dapat di budidayakan pada lahan tambak, selain udang dan ikan bandeng. Dalam budidaya rajungan dibutuhkan lahan tambak yang cukup luas dan benih rajungan yang cukup banyak. (Effendy *et al.*, 2005) mengatakan bahwa pemanfaatan tambak-tambak untuk budidaya rajungan yang tentunya berdasarkan analisis kesesuaian lahan bagi kultivan serta penggunaan *backyard* atau *hatchery* untuk produksi benih merupakan salah satu upaya revitalisasi. Pada sisi lain, kebutuhan larva rajungan yang cukup tinggi terhadap artemia diharapkan akan mampu mendorong usaha budidaya artemia di tambak garam. Pengembangan budidaya rajungan diharapkan mampu menyediakan bahan baku, menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Proyeksi penurunan persentase tingkat masyarakat miskin juga merupakan hal yang sangat diharapkan dari kegiatan budidaya rajungan. Pada akhirnya, usaha budidaya tersebut dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan nilai ekspor non migas.

KEBIJAKAN, TUJUAN, PROGRAM DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, sebagai mana telah diuraikan diatas. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut maka diperlukan adanya tujuan dan program-program yang jelas. Pada tabel berikut ini disajikan kebijakan, tujuan, program dan pelaksana dalam pengelolaan perikanan tangkap rajungan di perairan Kabupaten Pangkep disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Kebijakan, tujuan, program dan pelaksana pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep

Table 5. Policy, objectives, program and implementing for fisheries management in Pangkep District waters

Kebijakan/ Policy	Tujuan/Purpose	Program/Program	Pelaksana/Implement
Penciptaan mata pencaharian alternatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ mengurangi tekanan intensif penangkapan rajungan dilaut dengan mengalihkan sebagai nelayan ke pekerjaan lainnya yang sesuai kemampuannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan kajian kelayakan usaha dari setiap mata pencaharian alternatif ▪ melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dari setiap mata pencaharian alternatif yang terpilih ▪ memberikan pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan/Bappeda/Perguruan Tinggi dan LSM ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan/Bappeda/ Perguruan Tinggi/ Perdagangan dan UKM dan Koperasi ▪ Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi
Penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ terwujudnya penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ terwujudnya kesadaran masyarakat dalam penataan hukum untuk kelestarian sumberdaya rajungan dan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengadakan pelatihan-pelatihan hukum lingkungan untuk aparat penegak hukum dan aparat pemerintah (pejabat) ▪ peningkatan frekuensi operasi pengawasan di laut dan operasi pengamanan laut secara terpadu ▪ penambahan sarana, dan prasarana penegakan hukum yang memadai ▪ membentuk balai penyuluhan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan ▪ meningkatkan peran POKWASMAS di tiap wilayah kecamatan pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan/Bappeda/ Perguruan Tinggi dan LSM ▪ Polri, TNI AL, AD Kejaksaan dan PPNS (terpadu) ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda ▪ Dinas Kelautan & Perikanan dan badan penyuluh daerah, POLRI dan Kejaksaan ▪ Dinas Kelautan & Perikanan dan Bappeda

Tabel 5. Lanjutan
Table 5. Continued

Kebijakan/Policy	Tujuan/Purpose	Program/Program	Pelaksana/Implement
Pergunaan alat tangkap yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ terwujudnya upaya pelestarian sumberdaya rajungan dan sumberdaya lainnya ▪ terwujudnya kesadaran tentang pelestarian sumberdaya rajungan dan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sosialisasi alat tangkap yang ramah lingkungan ▪ meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap alat tangkap yang dioperasikan nelayan ▪ memberikan insentif untuk pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kelautan & Perikanan dan Badan Penyeluluh Daerah ▪ Dinas Kelautan & Perikanan dan badan penyeluluh daerah, POLRI dan Kejaksaan ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda
Melakukan Restocking sumber daya rajungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mempertahankan kelestarian sumberdaya rajungan di perairan ▪ menambah <i>rekrutimen</i> rajungan; di perairan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan <i>restocking</i> larva rajungan setiap tahun ▪ melakukan kerjasama terhadap pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ▪ membangun <i>hatchery</i> pembenihan rajungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mempertahankan kelestarian sumberdaya rajungan di perairan ▪ meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan sosialisasi zona-zona dan peruntukannya ▪ menyusun instrumen peraturan pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi ▪ memasukan zona konservasi dan zona pemanfaatan rajungan ke dalam dokumen perencanaan kabupaten seperti zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada saat review rencana zonasi dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kelautan & Perikanan dan Badan Penyeluluh Daerah ▪ Dinas Kelautan & Perikanan; BAPPEDE, LSM dan Perguruan Tinggi ▪ Dinas Kelautan & Perikanan; BAPPEDE, LSM dan Perguruan Tinggi
Pengembangan budidaya rajungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mendukung peningkatan produksi rajungan ▪ mengurangi laju eksploitasi rajungan di laut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan analisis kesesuaian dan daya dukung tambak-tambak yang sesuai untuk budidaya rajungan ▪ melakukan pelatihan-pelatihan teknik budidaya rajungan pada tambak ▪ melakukan pelatihan teknik pemberian pakan ▪ mengembangkan balai benih rajungan untuk mendukung pengembangan budidaya rajungan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kelautan & Perikanan ▪ Dinas Kelautan & Perikanan; ▪ Dinas Kelautan & Perikanan; ▪ Dinas Kelautan & Perikanan;

Hasil analisis integrasi faktor-faktor komponen SWOT terhadap pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep, mengandalkan pada kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang akan terjadi, melalui kebijakan alternatif antara lain: penciptaan mata pencaharian alternatif; penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan; penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; *Restocking* sumber daya rajungan; pengelolaan perikanan tangkap rajungan berbasis zonasi dan pengembangan budidaya rajungan. Seluruh kebijakan alternatif yang ditetapkan diwujudkan dalam berbagai program kerja sesuai tujuan yang ingin dicapai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Permasalahan dan ancaman yang terjadi dalam pengelolaan perikanan rajungan dapat diatasi dengan mengandalkan pada kekuatan dan peluang yang dimiliki seperti masih tersedianya potensi rajungan dan dukungan *stakeholder* masih cukup besar.
2. Hasil analisis A'WOT ketiga kategori responden memiliki pandangan bahwa prioritas relatif utama kekuatan terletak pada minat nelayan dan pemanfaatan rajungan tinggi sementara responden lainnya menganggap bahwa adanya pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan rajungan. Untuk prioritas relatif utama pada kelemahan ada pada koordinasi dan implementasi masih rendah. Selanjutnya untuk peluang semua responden berpandangan bahwa target PEMDA dalam pengelolaan rajungan cukup tinggi. Semua responden menganggap bahwa prioritas relatif utama dari ancaman adalah jumlah alat tangkap untuk penangkapan rajungan semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka alternatif pengembangan kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain: 1) Penciptaan mata pencaharian alternatif; 2) Penegakan hukum; 3) *Restocking* sumberdaya rajungan; 4) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; 5) Pengelolaan perikanan rajungan berbasis zonasi dan 6) Pengembangan budidaya rajungan.

PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan salah satu bagian dari disertasi penulis yang berjudul Pemanfaatan sumberdaya rajungan di perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kerjasamanya

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. Jaya & M.F. Sondita. 2006. Model Numerik Difusi Populasi Rajungan (*Portunus pelagicus*) di perairan Selat Makassar. *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*. 13(2): 83-88.
- Baskoro, M.S, 2011. Pengembangan Perikanan Tangkap Berkelanjutan melalui program Pengayaan Stok Ikan. *Orasi Ilmiah*. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Auditorium Sumardi Sastrakusumah FPIK-Institut Pertanian Bogor 19 November 2011. PT Penerbit IPB Press. 92 hal.
- Budiharsono, S. 2001. Analisis Prioritas, Alokasi Anggaran, Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 159 hal.
- Effendy, S., Faidar., Sudirman & E, Nurcahyono. 2005. Perbaikan Teknik Pemeliharaan Larva Pada Produksi Massal Benih Rajungan *Portunus pelagicus*. Makalah Pertemuan Teknis Lintas UPT Pusat Budidaya Air Payau dan Laut, di Imperial Aryaduta Makassar. Balai Budidaya Air Payau Takalar. 24 hal.
- Firman, 2008. Model Bioekonomi pengelolaan sumberdaya Rajungan di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 82 hal.
- Ihsan, E.S Wiyono, S.H Wisudo & J. Haluan. 2014. A Study of Biological Potential and Sustainability of Swimming Crab Population in the Waters of Pangkep Regency South Sulawesi Province. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*. 2014. 16(1): 351-363.
- Ihsan, E.S Wiyono, ES. S.H Wisudo & J. Haluan. 2014. Pola Musim dan Daerah Penangkapan Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Jurnal Marine Fisheries*. November 2014. 5 (2): 191-198.
- Ihsan, M. Saenong M., & A. Boceng. 2012. Determinasi Usaha Perikanan Tangkap Rajungan di Perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Jurnal Lutjanus*. 18 (2): 28-38.
- [KKP-KP3K-RI] Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2010. Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

- Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K) Provinsi/ Kabupaten. Jakarta. 110 hal.
- [KP3K-KKP-RI] 2007. Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat (COREMAP II). Diterbitkan oleh Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Phase II Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-Departemen Kelautan dan Perikanan. 139 hal.
- Kaleka, D.M.W., 2006. Analisis Pengembangan Armada Perikanan Tangkap di Perairan Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 116 hal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31. 10 hal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp.). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7. 5 hal.
- Purbayanto. A., M.R. Riyanto, & A.D.P. Fitri, 2010. Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan pada Perikanan tangkap. Cetakan Pertama, Juni 2010. PT Penerbit IPB Press. Bogor. 208 hal.
- Rangkuti F. 2002. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 188 hal.
- Soselisa A. 2006. Kajian Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Gugusan Pulau-pulau Padaido, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Nomfor, Papua. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor. 248 hal.
- Saaty T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks). (Terjemahan) PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 270 hal.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. 53 hal.